

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mohar Mondes

Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Abstract.

The purpose of this research is to analyse government's financial performance of Jambi Province. This research is using multiple linear regression to calculate and to see the effect of direct and indirect expenditure variable to the economic growth. This research is using secondary data that includes of local revenues, equalization funds, financial reception area, direct and indirect expenditure and also total expenditure of Jambi Province. This research is using verifikatif and kuantitatif analysis which is suite for analyse fiscal autonomy degree, fiscal dependency of Jambi Province toward central government and also to find out whether the direct and indirect expenditure has effect to economic growth. Research results showed that Jambi Province's DOF based on local revenue is 39,57%, placed in average condition, however if local revenue is add on DBH, it showed that the criteria is very good with 58,92%. The level of fiscal dependency 34,80% in average for years during observasion periode. By using multiple linear regression, the result showed that direct and indirect expenditure were positively and significantly effected to the economic growth of Jambi Province.

Keywords : direct and indirect expenditure, local revenues, fiscal autonomy degree, fiscal dependency.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi selama periode 2001-2014, penelitian ini dilengkapi dengan perhitungan maupun pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode 2001-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 14 tahun, berupa data realisasi PAD, realisasi dana perimbangan, realisasi total penerimaan daerah, realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasi total belanja. Analisis data yang digunakan adalah analisis verifikatif dan kuantitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui Derajat Otonomi Fiskal, Derajat Ketergantungan fiskal pemerintah Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat, serta ingin mengetahui apakah belanja langsung maupun belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DOF Provinsi Jambi atas dasar PAD rata-rata sebesar 39,57%, berada pada posisi cukup, namun bila PAD ditambahkan dengan DBH menunjukkan angka 58,92%, masuk kriteria sangat baik. Tingkat ketergantungan fiskal rata-rata 34,80% pertahun selama periode observasi. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Kata kunci : Belanja langsung dan tidak langsung, pendapatan asli daerah, derajat otonomi fiskal, ketergantungan fiskal.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, penelitian mengenai otonomi daerah yang berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan daerah masih merupakan topik yang selalu menarik untuk diteliti dan didiskusikan. Studi mengenai otonomi daerah tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan ataupun keterkaitan yang erat dengan bidang lainnya seperti politik, administrasi dan geografis. Disamping itu hasil kajian mengenai otonomi daerah dari sudut pandang pengelolaan keuangan daerah terkadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda diantara para peneliti.

Dalam kaitannya dengan penelitian kinerja keuangan dari sisi belanja daerah atau pengeluaran pemerintah, hasil penelitian dari beberapa peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belanja langsung atau belanja modal/belanja investasi dan belanja tidak langsung/belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) yang meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja langsung/belanja modal maupun belanja tidak langsung/belanja aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tandiawan, Naukoko dan Wauran (2014) menyimpulkan bahwa investasi swasta dan belanja pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya hasil studi Anasmen (2009) menunjukkan hasil atau kesimpulan yang berbeda, Anasmen menyimpulkan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Raharjo yang meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menyatakan bahwa variabel belanja tidak langsung pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja langsung pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perbedaan kesimpulan penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali hal yang sama yaitu pada pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar daerah memiliki permasalahan yang sama yaitu masih besarnya kontribusi dana perimbangan dibandingkan kontribusi PAD terhadap APBD yang sangat diharapkan guna menopang pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Tabel 1 memberikan perbandingan antara jumlah PAD dengan jumlah dana perimbangan seluruh provinsi yang ada di Sumatera untuk tahun anggaran 2015.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa hanya empat Propinsi yang memiliki kontribusi PAD lebih besar dari pada kontribusi dana transfer dalam APBD yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Lampung dan Provinsi Aceh, sedangkan enam propinsi lainnya yaitu Propinsi Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, porsi dana transfer masih mendominasi pendapatan daerahnya dalam APBD, artinya ketergantungan daerah tersebut akan dana dari pusat masih tinggi. Dari tabel 1.1 maupun Gambar 1.1 tersebut juga dapat dilihat bahwa PAD Provinsi Jambi masih dibawah PAD Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, dan Sumatera Barat, namun masih di atas Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Dalam menghasilkan PAD Provinsi Jambi masih menempati posisi ke-7 terendah se-Sumatera.

Tabel 1. Perbandingan antara PAD dengan Dana Perimbangan Propinsi se-Sumatera Tahun 2015 (dalam triliun Rupiah)

Provinsi	P A D	Dana Perimbangan
Aceh	1,88	1,66
Sumatera Utara	5,26	1,84
Sumatera barat	1,75	1,44
Riau	3,66	4,2
Kepri	1,13	1,86
Jambi	1,22	1,71
Bengkulu	0,7	1,23
Sumatera Selatan	2,78	3,26
Bangka Belitung	0,58	1,15
Lampung	2,34	1,58

Sumber data : diolah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri

Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa, penyebab tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan. Ketiga, kendati pajak daerah sudah cukup beragam, namun demikian hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Keempat, bersifat politis, dimana bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Kelima, kelemahan dalam sistem pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi periode 2010-2014 menunjukkan peningkatan. Mulai dari Rp.686.715.794.006,45 pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi Rp.984.232.579.912,83 pada tahun 2011, kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 996.144.816.439,21 pada tahun 2012. Kemudian meningkat menjadi Rp.1.063.804.724.914,10. Pada tahun 2013. Terahir meningkat lagi menjadi Rp.1.318.523.706.213,24 pada tahun 2014. Seiring dengan peningkatan PAD, pendapatan daerah Provinsi Jambi dari dana transfer juga mengalami peningkatan. Dari Rp.932.206.659.790 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.1.075.208.719.996 pada tahun 2011. Kemudian meningkat menjadi Rp.1.341.202.292.809,23 pada tahun 2012 dan terahir meningkat menjadi Rp.1.514.518.389.008 pada tahun 2014, seperti yang terlihat dari Tabel 2.

Dari Tabel 2 terlihat meskipun realisasi PAD mengalami peningkatan namun demikian dana perimbangan/dana tranfer menunjukkan kecenderungan yang meningkat pula. Dari sisi pertumbuhan pun dapat terlihat bahwa pertumbuhan PAD Propinsi Jambi dalam 5 tahun terahir rata-rata 20,37 % sedangkan pertumbuhan dana perimbangan sebesar 13,81%. Meskipun rata –rata pertumbuhan PAD lebih besar dari pertumbuhan dana transfer namun dari sisi nominal porsi ataupun kontribusi dana perimbangan masih lebih besar dibandingkan PAD dalam komponen pendapatan dalam APBD. Hal ini mengindikasikan masih besarnya kontribusi dana perimbangan dari pusat terhadap total pendapatan Provinsi Jambi bila dibandingkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan Provinsi Jambi. Kenyataan tersebut seakan bertolak belakang dengan pandangan Kaho (dalam Hanafi & Nugroho, 2009) yang menyatakan bahwa salah satu syarat daerah dikatakan otonom adalah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan rumah tangga daerahnya.

Tabel 2. Total Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Periode 2010-2014 (dalam rupiah)

Tahun	Sumber Pendapatan			
	P A D	Pertum- buhan	Dana Perimbangan	Pertumbuhan
2010	686.629.362.006,45	30,43%	932.205.659.790	16,23%
2011	984.232.579.912,83	43%	1.075.207.719.996	15,34%
2012	995.202.289.115,21	1,11%	1.341.202.292.809,23	24,74%
2013	1.063.879.903.502,10	6,89%	1.487.559.863.316,00	11,08%
2014	1.281.239.472.808,44	20,44%	1.514.518.389.008,00	1,66%
	Rata-rata	20,37%		13,81%

Sumber : DPPKAD Provinsi Jambi

Secara ideal, porsi alokasi belanja tidak langsung terutama untuk membiayai belanja pegawai daerah yang tidak terlalu tinggi, serta alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal daerah yang semakin meningkat akan mempercepat terciptanya wujud dan jenis pelayanan publik yang semakin baik, optimal dan efektif. Namun demikian, yang terjadi selama ini adalah realisasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal pada akhir tahun seringkali masih di bawah target, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan anggarannya. Di samping itu, masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal untuk pelayanan publik. Kondisi tersebut akan menyebabkan APBD tidak mampu untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang optimal.

Berdasarkan data dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2015 total belanja langsung untuk seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota sebesar Rp.455,42 Triliun Rupiah sedangkan untuk total belanja tidak langsung sebesar Rp.501,93 Triliun Rupiah, dari angkut tersebut terlihat bahwa jumlah belanja langsung lebih kecil bila dibandingkan dengan belanja tidak langsung.

Dari data tersebut juga didapat bahwa total belanja langsung untuk seluruh Provinsi sebesar Rp.126,68 triliun Rupiah sedangkan total belanja tidak langsung sebesar Rp.150,77 triliun Rupiah, adapun untuk seluruh kabupaten/Kota total belanja langsung sebesar Rp.328,73 triliun Rupiah sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.351,16 triliun Rupiah. Kedua-duanya mempunyai komposisi yang sama dimana belanja langsung lebih kecil bila dibandingkan belanja tidak langsung. Fenomena ini menjelaskan bahwa selama ini ada masalah dengan kualitas belanja daerah dalam APBD.

Apabila melihat APBD Provinsi Jambi dalam lima tahun terakhir, maka dapat terlihat bahwa Provinsi Jambi telah mengalokasikan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung seperti yang terdapat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa pertumbuhan belanja langsung rata-rata 16,44 % dalam APBD sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 18,28% dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung masih dibawah pertumbuhan belanja tidak langsung. Kondisi ini menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam kualitas belanja pemerintah dalam APBD dimana semestinya pertumbuhannya belanja langsung mesti lebih besar dari belanja tidak langsung. Belanja pegawai dan belanja lain-lain adalah belanja yang bersifat konsumtif, sementara belanja modal serta belanja barang dan jasa adalah merupakan belanja yang bersifat investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan klasifikasi ekonomi untuk menganalisis belanja dimaksudkan untuk

mengetahui sampai sejauh mana belanja pemerintah untuk kepentingan pembangunan lebih didominasi belanja yang bersifat konsumsi atau investasi. Pergeseran dari belanja yang bersifat konsumsi ke belanja yang bersifat investasi merupakan indikasi yang baik, karena semakin besar belanja yang bersifat investasi untuk layanan publik memberi dampak yang baik pada pembentukan modal sosial. Semakin besar modal sosial, aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan semakin besar pula sebagaimana yang tersirat dalam berbagai peraturan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menitikberatkan keberpihakan anggaran yang besar untuk kepentingan publik (belanja langsung).

Tabel 3. Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari APBD Provinsi Jambi Periode 2010 s.d 2014 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	APBD	Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung	
		Rp	Pertumbuhan (%)	Rp	Pertumbuhan (%)
2010	1.488.130.349.597.62	815.863.302.775.00	-3,43	672.267.046.822.62	-1,88
2011	1.750.241.856.160.33	989.902.384.414.50	21,33	760.339.471.745.83	13,10
2012	2.558.079.676.618.46	1.363.635.887.510.00	37,75	1.194.443.789.108.46	57,09
2013	3.012.362.428.561.54	1.740.362.947.376.24	27,63	1.271.999.481.185.30	6,49
2014	3.204.632.835.005.90	1.721.517.299.783.00	-1,08	1.483.115.535.222.00	16,60
	Rata-rata		16,44		18,28

Sumber : DPPKAD Provinsi Jambi

Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah terus meningkat maka basis pajak pun akan meningkat. Bila basis pajak meningkat maka hal ini akan berdampak pada peningkatan PAD. Bila PAD meningkat maka tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah akan semakin berkurang (Ariansyah, 2012), ini berarti bahwa daerah tersebut tidak begitu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat atas pembiayaan pembangunan. Hal ini mencerminkan kemandirian daerah tersebut dalam hal keuangan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dapat dilihat dari Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009 s/d 2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	6,39
2010	7,35
2011	7,86
2012	7,03
2013	7,07
2014	7,76
Rata-rata	7,24

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari Tabel 4 dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 6,39% kemudian meningkat menjadi 7,35% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,03%. Namun demikian dari tahun 2012 sampai 2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terus meningkat. Dalam empat tahun terakhir ini, kenaikan perekonomian Jambi melebihi rata-rata nasional. BPS melansir capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76 persen berada diperingkat pertama se-Sumatera dan kedua secara nasional. Meskipun

kemampuan Provinsi Jambi dalam menghasilkan PAD menempati peringkat ke-7 untuk Provinsi yang ada di Sumatera namun dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menempati urutan pertama, fenomena ini menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti lebih jauh dan hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan Provinsi Jambi sebagai lokus penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Jambi selama periode 2001 sampai dengan 2014; 2) Untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah pusat selama periode 2001 sampai dengan 2014; 3) Untuk menganalisis tingkat efektivitas PAD pemerintah Provinsi Jambi dengan selama periode 2001 sampai dengan 2014; 4) Untuk menganalisis kinerja belanja daerah pemerintah Provinsi Jambi (belanja langsung maupun belanja tidak langsung terhadap total belanja) selama periode 2001 sampai dengan 2014; 5) Untuk menganalisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi periode 2001 sampai dengan 2014

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data tahunan/berkala (*time series*). Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. APBD Provinsi Jambi Tahun 2001 sampai dengan 2014
2. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014
3. Buku Jambi dalam angka dari beberapa edisi

Analisis Data

1. Untuk menganalisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Provinsi Jambi, digunakan rumus sebagai berikut:

$$DOF = \frac{P}{T} \times 100\%$$

Dimana :

- DOF = Derajat Otonomi Fiskal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t
 TPD = Total Penerimaan Daerah pada tahun t

Tabel 5. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Kriteria Derajat desentralisasi fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

2. Untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan pemerintah pusat digunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{kt} = \frac{E}{T} \times 100\%$$

Dimana :

- R_{kt} = Rasio Ketergantungan
- DTP = Dana Transfer Pusat Tahun _t
- TPD = Total Penerimaan Daerah Tahun _t

Tabel 6. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma,dkk 2010)

3. Untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2001 sampai 2014, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{R}{T} - \frac{P}{P_t} \times 100\%$$

Tabel 7. Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan Daerah	Kriteria Efektivitas PAD
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

4. Untuk menganalisis kinerja pengeluaran daerah Pemerintah Provinsi Jambi baik dari sisi belanja langsung maupun belanja tidak langsung digunakan rumus sebagai berikut :

1. Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

$$PBL = \frac{B}{T} \times 100\%$$

2. Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

$$PBTL = \frac{B}{T} \times 100\%$$

Dimana :

- PBL = Proporsi belanja langsung
- PBTL = Proporsi belanja tidak langsung
- BL = Belanja Langsung
- BTL = Belanja Tidak Langsung
- TB = Total Belanja

5. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diwakili oleh belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi

Jambi digunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi linier berganda secara umum dirumuskan sebagai berikut :

Adapun model persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- β_1 = Konstanta
- β_2, β_3 = Koefisien Regresi parsial
- X_2 = Belanja Langsung
- X_3 = Belanja Tidak Langsung
- e_i = Error/faktor gangguan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau biasa di sebut dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lainnya.

Tabel 8. Derajat Otonomi Fiskal Provinsi Jambi Berdasarkan PAD Tahun 2001-2014

Tahun	PAD (Rp000)	TPD (Rp000)	DOF (%)
2001	82.232.143	297.734.347	27.62
2002	149.648.651	449.304.175	33.31
2003	225.323.148	616.193.475	36.57
2004	287.637.721	630.144.010	45.65
2005	344.880.739	748.820.793	46.06
2006	385.042.833	1.010.116.941	38.12
2007	451.050.873	1.155.350.577	39.04
2008	626.584.552	1.436.797.231	43.61
2009	526.523.500	1.355.653.169	38.84
2010	686.629.362	1.640.185.858	41.86
2011	984.232.579	2.078.806.913	47.35
2012	995.202.289	2.662.697.133	37.38
2013	1.063.879.903	2.886.262.906	36.86
2014	1.281.239.472	3.165.055.792	40.48
Rata-rata Derajat Otonomi Fiskal			39.48

Sumber Data : LKPD Provinsi Jambi (data diolah)

Dalam hal ini desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di ukur dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, yaitu dengan membandingkan antara nilai PAD dibagi dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan Tabel 8 yang memuat perhitungan DOF pemerintah daerah Provinsi Jambi menunjukkan bahwa selama periode 2001-2014 derajat otonomi fiskal Provinsi Jambi rata-rata sebesar 39,48%. Apabila mengacu pada kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM pada Tahun 1991, maka selama periode tersebut DOF provinsi Jambi berada pada posisi cukup.

Kondisi ini bukan merupakan kondisi yang baik bagi kemandirian Provinsi Jambi, ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana dari pemerintah pusat. Inilah yang menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Jambi agar bersama-sama berupaya dalam hal meningkatkan PAD pemerintah Provinsi Jambi sehingga Provinsi Jambi bisa menjadi Provinsi yang mandiri. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Apabila dilihat secara tahunan maka pada tahun 2001, derajat otonomi fiskal Provinsi Jambi berada pada posisi yang sangat rendah selama periode observasi yaitu hanya 27,62% artinya PAD Provinsi Jambi hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 27,62% terhadap total pendapatan daerah Provinsi Jambi, selebihnya Provinsi Jambi harus menutupinya dengan dana dari Pemerintah Pusat termasuk didalamnya adalah Dana Alokasi Umum.

Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. Kondisi tertinggi derajat otonomi fiskal Provinsi Jambi selama periode observasi terjadi pada tahun 2011, dimana nilai DOF nya sebesar 47,35%. Hampir separuh dari total pendapatan Provinsi Jambi berasal dari PAD Provinsi Jambi. Ini artinya DOF Provinsi Jambi ada dalam posisi yang baik.

Apabila dilihat dari tahun ke tahun maka akan nampak bahwa besaran DOF Provinsi Jambi selalu berfluktuatif. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 DOF Provinsi Jambi berada pada posisi cukup, dua tahun kemudian secara berturut-turut berada pada posisi baik, namun pada tahun 2006-2007 DOF Provinsi Jambi kembali turun pada posisi cukup, tahun 2008 DOF Provinsi Jambi naik lagi ke posisi baik, hanya berselang setahun DOF Provinsi Jambi kembali turun ke posisi cukup, sampai pada tahun 2014 kondisi DOF provinsi Jambi berada pada posisi baik yaitu pada angka 40,48%

Secara keseluruhan angka derajat otonomi fiskal Pemerintah Provinsi Jambi selama periode observasi pada posisi cukup, mendekati posisi baik. Namun hal ini tidaklah cukup, pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* diharapkan agar lebih mengoptimalkan semua potensi PAD yang ada agar bisa memberikan kontribusi yang tinggi bagi pendapatan daerah Provinsi Jambi sehingga akan lebih banyak lagi program dan kegiatan pembangunan yang mampu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jambi sebagai refleksi tanggungjawab daerah atas pelaksanaan otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kiranya pemerintah Provinsi Jambi perlu segera melakukan pembenahan-pembenahan baik yang bersifat administratif maupun teknis. Hal ini sebagai upaya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang utamanya untuk peningkatan PAD. Dengan meningkatnya PAD paling tidak nantinya dapat dijadikan tumpuan atau andalan dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu tidak kalah pentingnya diharapkan secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Tingkat Ketergantungan Fiskal/Derajat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan fiskal adalah merupakan gambaran seberapa besar peranan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam struktur pendapatan daerah. Tingkat ketergantungan fiskal ini merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah,

semakin kecil tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah maka semakin mandiri daerah tersebut.

Tabel 9. Derajat Ketergantungan Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	(DBH+DAU+DAK) (Rp000)	TPD (Rp000)	DKF (%)
2001	181.172.097	297.734.347	60,85
2002	232.946.044	449.304.175	51,85
2003	287.144.585	616.193.475	46,60
2004	333.981.288	630.144.010	53,00
2005	393.688.552	748.820.793	52,57
2006	625.074.108	1.010.116.941	61,88
2007	686.556.648	1.155.350.577	59,42
2008	745.860.902	1.436.797.231	51,91
2009	802.060.280	1.355.653.169	59,24
2010	973.218.980	1.640.185.858	59,34
2011	1.075.207.719	2.078.806.913	51,72
2012	1.341.202.292	2.662.697.133	50,37
2013	1.487.559.863	2.886.262.906	51,54
2014	1.514.518.388	3.165.055.792	47,85
Rata-rata Derajat Ketergantungan Fiskal (DKF)			54,15

Sumber Data : LKPD Provinsi Jambi (data diolah)

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa selama periode 2001-2014 derajat ketergantungan fiskal Provinsi Jambi rata-rata sebesar 54,15% pertahun. Hal ini berarti 54,15% kontribusi dari pemerintah pusat (DBH+DAU+DAK) terhadap total pendapatan daerah Provinsi Jambi. Sisa nya yaitu sebesar 45,85% adalah merupakan pendapatan yang bersumber dari PAD. Dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2006, derajat ketergantungan fiskal Provinsi Jambi sangat tinggi yaitu sebesar 61,88%. Hal ini dikarenakan PAD Provinsi Jambi yang masih relatif rendah, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2003 terjadi penurunan DKF Provinsi Jambi menjadi sebesar 46,60%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2014,DKF Provinsi Jambi berfluktuatif yaitu berada pada kisaran 50% - 60%. Penurunan proporsi DKF ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya PAD Provinsi Jambi dari setiap tahunnya.

Selama periode observasi, proporsi DKF yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 47,85% hal dikarenakan pertumbuhan PAD sebesar 1,81% melebihi dari pertumbuhan DBH +DAU+DAK yaitu sebesar 20,43% sehingga kontribusi PAD lebih mendominasi dalam proporsi pendapatan daerah Provinsi Jambi sehingga ketergantungan terhadap dana pusat menjadi menurun.

Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola PAD adalah dengan melihat dan mengukur rasio efektivitasnya. Tujuan dari pengukuran tingkat efektivitas adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan (Bisma, 2010)

Tabel 10. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jambi Tahun 2001-2014 (Rp000)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2001	82.232.143	60.687.908,-	143,52	Sangat Efektif
2002	149.648.651	81.704.000,-	183,16	Sangat Efektif
2003	225.323.148	172.303.467,-	130,77	Sangat Efektif
2004	287.637.721	200.123.175,-	143,73	Sangat Efektif
2005	344.880.739	279.997.834,-	123,17	Sangat Efektif
2006	385.042.833	312.884.335,-	123,06	Sangat Efektif
2007	451.050.873	364.927.123,-	123,60	Sangat Efektif
2008	626.584.552	406.306.854,-	154,20	Sangat Efektif
2009	526.523.500	408.309.785,-	128,93	Sangat Efektif
2010	686.629.362	455.795.726,-	150,64	Sangat Efektif
2011	984.232.579	641.658.215,-	153,39	Sangat Efektif
2012	995.202.289	753.366.207,-	132,10	Sangat Efektif
2013	1.063.879.903	902.554.697,-	117,87	Sangat Efektif
2014	1.281.239.472	1.208.837.984,-	105,99	Sangat Efektif
Rata-rata			136,72	Sangat Efektif

Tabel 10 memperlihatkan bagaimana kondisi rasio efektivitas pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 yang menggambarkan bagaimana perbandingan antara target PAD dengan realisasi PAD pemerintah Provinsi Jambi. dari tabel 5.4 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2001 sampai dengan 2014 rasio efektivitas pemerintah Provinsi Jambi selalu diatas 100%, artinya realisasi PAD melibihi dari target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas tertinggi ada pada tahun 2002 yaitu sebesar 183,16 hampir mendekati 200% ini menandakan terjadinya lonjakan penerimaan PAD sementara rasio efektivitas PAD yang terendah terjadi pada tahun 2014, yaitu hanya sebesar 105,14 %, artinya realisasi tetap melampaui target namun tidak signifikan. Namun demikian hal ini bisa dilihat dari sisi yang berbeda dimana terjadinya realisasi yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan target bisa jadi dikarenakan penetapan target yang tidak berdasarkan perhitungan potensi yang ada atau potensi yang sebenarnya ada di lapangan, penetapan target hanya dengan memperkirakan saja atau hanya meningkatkan beberapa persen dari target sebelumnya sehingga realisasinya tentu tidak sama dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu sangat penting bagi daerah menghitung potensi PAD yang real dilapangan sehingga penetapan target PAD benar-benar sesuai dengan potensi yang ada dan hal ini akan menutup celah penyimpangan dalam pengelolaan PAD yang ada di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah untuk menjadi daerah yang mandiri dapat terwujud. Secara rata-rata rasio efektivitas PAD pemerintah Provinsi Jambi sebesar 136,72 % dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Analisis Rasio Belanja Pemerintah Daerah.

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (Mahmudi,2007). Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bagaimana

proporsi belanja langsung pemerintah Provinsi Jambi selama 14 tahun terakhir. Rata-rata proporsi belanja langsung pemerintah Provinsi Jambi sebesar 54.02% pertahun, ini artinya belanja langsung mendapatkan porsi yang sedikit lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung.

Tabel 11. Proporsi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Belanja Langsung (Rp 000)	Pertumbuhan (%)	Total Belanja (Rp 000)	Rasio Belanja Langsung Thd Total Belanja (%)
1	2	3	4	5
2001	55.549.979	-39,29	228.955.125	24.26
2002	127.791.490	130.05	354.284.731	36.07
2003	185.624.299	45.26	489.371.648	37.93
2004	329.933.787	77.74	581.432.848	56.74
2005	416.359.324	26.19	642.833.104	64.77
2006	685.390.559	64.62	963.238.880	71.15
2007	778.630.301	13.59	1.105.387.894	70.43
2008	893.259.407	14.73	1.404.983.484	63.58
2009	844.896.912	-5.41	1.530.073.192	55.22
2010	815.863.302	-3.44	1.488.130.350	54.82
2011	989.902.384	21.33	1.750.241.855	56.56
2012	1.363.635.887	37.75	2.558.079.676	53.31
2013	1.740.362.947	27.63	3.012.362.428	57.77
2014	1.721.517.299	-1.08	3.204.632.834	53.72
Rata-rata		29,26		54.02

Sumber Data : LKPD Provinsi Jambi (data diolah)

Kondisi ini cukup baik namun belum ideal, karena proporsi belanja langsung belum diatas 60%. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa belanja langsung adalah merupakan belanja yang bersifat investasi. Secara definisi dalam Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: a. Belanja pegawai, b. Belanja barang dan jasa, dan c.belanja modal.

Dengan porsi yang besar terhadap belanja langung dalam APBD maka diharapkan dapat mempercepat tersedianya sarana dan prasarana layanan publik yang baik, yaitu yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), karena sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyediakan dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana layanan publik melalui pengaturan pola alokasi belanja daerah dalam APBD yang diharapkan dapat mendorong peningkatan *Public services* yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 alokasi terhadap belanja langsung sudah pada kondisi yang ideal dimana proporsi untuk belanja langsung adalah sebesar 71,15%. Dari 963 milliar total belanja daerah, sebanyak 685 milliar di keluarkan untuk belanja langsung. Kondisi seperti ini semestinya harus dipertahankan. Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan pelayanan dan membangun

infrastruktur publik melalui alokasi dan pelaksanaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan ini akan dapat terwujud jika proporsi belanja pemerintah dalam APBD dalam kondisi yang ideal, yaitu memberikan porsi yang besar untuk belanja langsung. Sebaliknya pada tahun 2001 terjadi kondisi yang sangat berlawanan dimana belanja langsung mendapatkan porsi yang sangat kecil sekali yaitu hanya 24,26%. Bagaimana mungkin pemerintah dapat melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan anggaran yang sangat kecil sekali.

Disisi lain bila dilihat proporsi belanja tidak langsung pemerintah Provinsi Jambi selama periode observasi memiliki rata-rata sebesar 45,98% pertahun (lihat Tabel 5.6). Ini artinya dari seluruh total belanja dalam APBD maka rata-rata pertahun yang dikeluarkan untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 45,98%, selebihnya anggaran tersebut dikeluarkan untuk belanja langsung. Secara definisi dalam Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun belanja tersebut terdiri dari : a. Belanja pegawai, b. Belanja bunga, c. Belanja subsidi, d. Belanja hibah, e. Belanja bantuan sosial, f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Selanjutnya Tabel 12 menunjukkan bahwa pada tahun 2001 proporsi belanja pemerintah memperlihatkan kondisi yang sangat tidak ideal. Dimana porsi untuk belanja tidak langsung sangat mendominasi yaitu sebesar 75,74%

Tabel 12. Proporsi Belanja Tidak Langsung Terhadap total Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp 000)	Pertumbuhan (%)	Total Belanja (Rp 000)	Rasio Belanja Tdk.Langsung Thd Total Belanja (%)
1	2	3	4	5
2001	173.405.146	150,76	228.955.125	75,74
2002	226.493.241	30,62	354.284.731	63,93
2003	303.747.349	34,11	489.371.648	62,07
2004	251.499.061	-17,20	581.432.848	43,26
2005	226.473.780	-9,95	642.833.104	35,23
2006	277.848.321	22,68	963.238.880	28,85
2007	326.833.775	17,63	1.105.387.894	29,57
2008	511.724.076	56,57	1.404.983.484	36,42
2009	685.176.280	33,90	1.530.073.192	44,78
2010	672.267.046	-1,88	1.488.130.350	45,18
2011	760.339.471	13,10	1.750.241.855	43,44
2012	1.194.443.789	57,09	2.558.079.676	46,69
2013	1.271.999.481	6,49	3.012.362.428	42,23
2014	1.483.115.535	16,60	3.204.632.834	46,28
Rata-rata		29,32		45,98

Sumber Data : LKPD Provinsi Jambi (data diolah)

Belanja tidak langsung bisa juga dikatakan sebagai belanja yang bersifat konsumtif, maka dari itu secara ideal, porsi alokasi belanja tidak langsung terutama untuk membiayai belanja pegawai daerah harus dihitung secermat mungkin agar tidak terjadi pemborosan. Proporsi belanja tidak langsung Provinsi Jambi sebesar rata-rata

45,98% pertahun selama 14 tahun terakhir tersebut masih tergolong cukup tinggi dan belum dalam kondisi ideal. Artinya hanya sekitar 55% saja dari total anggaran yang digunakan untuk belanja langsung sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, porsi anggaran yang bisa dikatakan tidak begitu besar untuk membiayai banyak sekali program pembangunan khususnya dalam membangun infrastruktur guna menopang perekonomian agar bisa tumbuh lebih cepat.

Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan ketepatan atau *goodness of fit* model yang digunakan. Semakin besar nilai koefisien determinasi (R²), yang dicerminkan pada angka koefisien determinasi mendekati satu (1) maka akan semakin baik model tersebut dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Sebaliknya, semakin kecil nilai R² atau nilainya mendekati Nol (0), maka akan semakin tidak baik model yang digunakan.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien determinasi atau R² sebesar 0,9748 Nilai ini menunjukkan bahwa variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung telah memberikan kontribusi sebesar 97,48 % dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sedangkan sisanya sebesar 2,52% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model ini.

Dengan demikian secara umum model yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh simultan pengaruh variabelvariabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil analisa data menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 213.1710 dengan probabilitas yang sangat signifikan sekali yaitu 0,00000 (lihat Tabel 5.9). Jika nilai probabilitas nya lebih kecil dari alpha 1% atau nilai F hitung > dari nilai F tabel maka dengan demikian dapat menolak H₀ dan mengambil kesimpulan bahwa variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Adapun hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung 213.1710 sedangkan nilai F tabel 1%; df1 (k-1) = 3-1 = 2 ; df2 (n-k) = 14-3 = 11 nilai F (2,11) adalah 7,21 sehingga didapat F hitung (213.1710) > F tabel (7.21), maka H₀ ditolak berarti kesimpulannya bahwa variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas (*independent*) yaitu belanja langsung maupun belanja tidak langsung terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB). Parameter suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan sebaliknya.

Dengan menggunakan alpha = 1% dan derajat kebebasan (df) 11 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,7180. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk

variabel belanja langsung (X₂) sebesar 3,4715 dengan probabilitas sebesar 0,0052. Sedangkan nilai t hitung untuk belanja tidak langsung (X₃) sebesar 7,9759. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung lebih besar dari nilai t tabel (3,4715 dan 7,9759 > 2,7180). sehingga dapat menolak hipotesis nol (H₀) dan menyimpulkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Dari hasil regresi juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas terbukti memiliki angka probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan alpha (tingkat keyakinan) yang telah ditentukan yaitu sebesar 1 % (lihat Tabel 5.9) sehingga dapat menolak hipotesis nol (H₀) dan menyimpulkan bahwa belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Interpretasi Model

Persamaan regresi berganda pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi diberikan sebagai berikut :

$$\begin{array}{ll}
 Y = 4.892032 + 0,081335X_2 + 0,26392X_3 + e & R^2 = 0,9748 \\
 SE = (0.1583) \quad (0,023429) \quad (0,03309) & F = 213.1710 \\
 t = (30.8927)^{**} \quad (3,4715)^{**} \quad (7,97594)^{**} & df = 11
 \end{array}$$

Interpretasi koefisien regresi masing-masing variabel diberikan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung (X₂)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi 0,021345 berarti bahwa setiap peningkatan belanja langsung pemerintah sebesar 1% akan menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08133 % selama periode observasi yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014.

Merujuk dari hasil penelitian yang telah diolah peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial variabel belanja langsung daerah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swaramarinda dan Indriani (2011) yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Pengeluaran Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari tahun 1972-2007 dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa sangat perlu untuk meningkatkan alokasi belanja langsung dalam APBD dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung yang terjadi pada pemerintah Provinsi Jambi sebenarnya sangat diharapkan, karena belanja langsung merupakan investasi bagi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, air dan lain-lain. Peningkatan belanja ini menandakan keberpihakan dan kepedulian pemerintah daerah akan kepentingan publik. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi sehingga secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Rostow dan Musgrave yang menyatakan pada tahap pembangunan diperlukan investasi pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam

penelitian ini investasi pemerintah yang dimaksud yaitu pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung.

2. Belanja Tidak Langsung (X_3)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pemerintah Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi 0,26394. Berarti bahwa setiap peningkatan belanja tidak langsung pemerintah sebesar 1% akan menyebabkan terjadinya peningkatan PDRB sebesar 0,26394% selama periode observasi yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diolah peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial variabel belanja tidak langsung daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Hasil studi ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swaramarinda dan Indriani (2011) seperti yang telah dijelaskan /disebutkan pada variabel belanja langsung di atas. Hal ini juga dikemukakan oleh Rahayu (2011) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dari 1994 -2008. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja langsung maupun belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.

Jumlah pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung yang tinggi di Provinsi Jambi akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung ini memang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, namun dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung ini dapat memberikan dampak terhadap pelayanan publik yang dilakukan pegawai pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat memperlancar berbagai proses kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya yang disertai dengan perhitungan dan pengujian untuk melihat pengaruh variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2001-2014, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan bahwa selama periode observasi (2001-2014) Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Jambi atas dasar PAD rata-rata sebesar 39,48% pertahun. Ini artinya DOF Provinsi Jambi berada pada level cukup. Sementara DOF Provinsi Jambi atas dasar PADS yang merupakan penjumlahan PAD dengan DBH menunjukkan angka 58,83% dan ini sudah masuk kriteria sangat baik.
2. Tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi Jambi selama periode observasi adalah rata-rata sebesar 54,15% pertahun. ini artinya Provinsi Jambi masih sangat tinggi bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat
3. Dari sisi pengelolaan PAD selama periode 2001-2014 maka pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kriteria sangat efektif (rasio efektivitas >100%)
4. Dari sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, selama periode observasi terlihat alokasi untuk belanja langsung sedikit lebih besar porsi nya bila dibandingkan belanja tidak langsung dengan perbandingan 54,02% berbanding 45,98% .

5. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel bebas (belanja langsung dan belanja tidak langsung) baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada tingkat keyakinan 99%

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian ini menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan melalui program intensifikasi yang disertai dengan pemetaan/perhitungan potensi yang real, bukan potensi yang hanya di perkirakan saja
2. Perlu regulasi yang disertai dengan sanksi dari pemerintah pusat yang mengatur proporsi yang ideal mengenai belanja pemerintah daerah, sehingga porsi untuk belanja langsung yang benar-benar dapat langsung dirasakan oleh publik dan mampu menggerakkan roda perekonomian dapat terus ditingkatkan.
3. Perlunya menjaga hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sehingga peran pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dapat dipertahankan.
4. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah daerah sebaiknya BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) lebih memperbesar porsi anggaran untuk belanja pemerintah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Amir, Amri (2007), *Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Globalisasi*, . Bogor :Penerbit Biografika
- Anasmen, (2009) *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006.*,Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- Bisma,I Dewa Gde & Susanto, Hery, (2010). *Jurnal Ganecswara Edisi Khusus Vol.4 No.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*
- Budiono, (1994). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, edisi 1, bpfe,Jogjakarta,
- Damarsari,R.; Junaidi ;Yulmardi Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 9-20
- Fisipol UGM, (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*. Litbang Depdagri. Jakarta.

- Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul., (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Jogjakarta, UPP AMP YKPN.
- Hanafi, Imam dan Nugroho, T. (2009). *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Haryanto, P.T., (2013) *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Economic Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang.
- Insukindro, (1994), *Peranandan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Irawan, Dewito., *Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Jambi
- Jhingan, ML., (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaini, (2009), *Analisis Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Sarolangun*, Tesis, Universitas Jambi.
- Junaidi, J. (2014). Regresi dengan Microsoft Office Excel. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Junaidi ; Zulgani . (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Edisi 3, 27-33
- Junaidi, J. (2015). Bentuk Fungsional Regresi Linear (Aplikasi Model dengan Program SPSS). Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Kadarisna, (2012), *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal Provinsi Jambi Periode 2000-2010*, Tesis, Universitas jambi.
- Kaho, Josef Riwu, (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat, (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Ladjin, (2008), *Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Tengah)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN
- Mangkoesebroto, Guritno, (1999). *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.